

**EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN SANIPAH
BERSIH DI KELURAHAN SANIPAH KECAMATAN
SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Devinka Yuristia

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 13, Nomor 01, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul :EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN SANIPAH
BERSIH DI KELURAHAN SANIPAH KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Pengarang : Devinka Yuristia
NIM : 2202026129
Program : S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1
Pemerintahan Integratif Fisip Unmul.

Samarinda, 24 Juli 2026
Pembimbing


Muh. Fichriyadl Hastira, S.IP., M.Si
NIP. 19971125 202406 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 PIN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Pemerintahan Integratif	Bagian Perpustakaan S1 PIN
Volume	:	
Nomor	:	
Tahun	:	
Halaman	:	AULIA RAHMAH, S.IP

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN SANIPAH BERSIH DI KELURAHAN SANIPAH KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Devinka Yuristia¹, Muh. Fichriyadi Hastira²

Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan sampah di Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang hingga saat ini belum tertangani secara optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta dampak kebijakan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemerintah Kelurahan Sanipah menginisiasi Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB) berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Gerakan Sanipah Bersih telah berjalan dan memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta menyediakan layanan pengelolaan sampah. Namun pelaksanaannya belum optimal, ditandai dengan masih banyaknya sampah dan keterlambatan pengangkutan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, rendahnya kedisiplinan masyarakat, serta kondisi geografis yang kurang mendukung.

Kata Kunci : *evaluasi kebijakan, pengelolaan sampah, hambatan implementasi, partisipasi masyarakat*

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang pesat serta pergeseran pola konsumsi masyarakat modern membawa konsekuensi logis berupa peningkatan volume eksternalitas negatif, salah satunya adalah sampah domestik. Di daerah berkembang seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, dinamika pengelolaan sampah menghadapi tantangan struktural yang kompleks akibat disparitas geografis dan ketersediaan fasilitas infrastruktur penunjang. Fenomena ini terlihat jelas di Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, di mana produksi limbah padat rumah tangga terus melonjak.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dvinkayristia1@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Secara faktual, penanganan masalah kebersihan lingkungan di Kelurahan Sanipah sempat mengalami stagnasi signifikan akibat perubahan kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal. Kebijakan penutupan ini memicu penumpukan sampah di berbagai sudut pemukiman karena tidak ada alternatif lokasi pembuangan akhir yang siap menampung volume sampah harian. Di sisi lain, keterbatasan armada pengangkut serta minimnya alokasi anggaran operasional dari dinas terkait menyebabkan kinerja penanganan kebersihan mengalami penurunan yang drastis.

Melihat situasi kritis tersebut, Pemerintah Kelurahan Sanipah berinisiatif meluncurkan sebuah terobosan lokal melalui Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB). Program ini didesain sebagai skema pengelolaan sampah mandiri yang mengedepankan asas gotong royong dan kemitraan aktif bersama warga. Keberadaan GSB diarahkan bukan sebatas instrumen teknis pengangkutan sampah semata, melainkan dirancang sebagai katalisator perubahan perilaku sosial kebersihan lingkungan di tingkat akar rumput. Melalui pendekatan integratif ini, program diharapkan mampu meminimalisasi ketergantungan penuh pada fasilitas pemerintah kabupaten yang serba terbatas.

Namun, dalam perjalanannya yang sudah memasuki beberapa fase implementasi, efektivitas GSB masih dipertanyakan. Penumpukan sampah ilegal secara sporadis di lahan-lahan kosong serta keluhan warga mengenai jadwal ritasi pengangkutan yang tidak menentu mengindikasikan adanya disonansi antara perencanaan normatif program dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, sebuah kajian ilmiah mendalam mengenai evaluasi kebijakan program mutlak diperlukan. Evaluasi ini memfokuskan analisis pada sejauh mana capaian keberhasilan program serta mengurai simpul-simpul hambatan, baik dari dimensi internal birokrasi maupun tekanan eksternal kewilayahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB) melalui kriteria evaluasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB) di Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan? serta (2) Apa saja hambatan internal dan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB) di wilayah tersebut? Penjelasan atas kedua pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif sekaligus dasar pertimbangan evaluatif bagi perbaikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis komunitas di tingkat kelurahan.

Kerangka Dasar Teori

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn merupakan instrumen analisis kritis untuk menilai performa suatu program aksi pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik melalui tiga fungsi utama, yakni memberikan informasi kinerja yang valid, memfasilitasi klarifikasi dan kritik atas nilai dasar kebijakan, serta memberi sumbangan bagi rekomendasi perumusan masalah (Hasbullah & Anam, 2019; Wahab, dalam Hasbullah & Anam, 2019). Lester dan Stewart serta Anderson menegaskan bahwa evaluasi bertugas menentukan konsekuensi kebijakan dengan menilai substansi, implementasi, hingga dampaknya berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Hasbullah & Anam, 2019; Hardiyanti, 2021). Kerangka evaluasi suatu program dapat ditinjau melalui berbagai pendekatan teoretis, mulai dari *Responsive Evaluation Model* oleh Robert Stake, *Goal Based Evaluation Model* oleh Ralph

W. Tyler, *Goal Free Evaluation Model* oleh Michael Scriven, hingga *CIPP Model* oleh Daniel Stufflebeam (Akbar & Mohi, 2018). Secara operasional, Dunn merumuskan enam indikator utama sebagai tolok ukur evaluasi kebijakan, meliputi efektivitas untuk mengukur ketercapaian hasil yang diharapkan, efisiensi untuk mengukur jumlah usaha atau biaya yang diperlukan, kecukupan untuk menilai seberapa jauh pencapaian memecahkan masalah, pemerataan untuk memastikan keadilan distribusi manfaat, responsivitas untuk mengukur kepuasan kebutuhan kelompok sasaran, serta ketepatan (*appropriateness*) untuk menilai kelayakan dan kegunaan substantif dari tujuan kebijakan itu sendiri terhadap realitas kebutuhan riil masyarakat (Putra & Ismaniar, 2020; Winarta, Raka, & Sumada, 2020).

Implementasi dan Hambatan Kebijakan

Menurut teori kebijakan publik, proses implementasi bukanlah jalur linier yang bebas hambatan, melainkan medan kompleks yang dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya serta dinamika lingkungan eksternal. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya alokasi pembiayaan, serta sarana prasarana yang belum memadai sering kali menjadi tantangan utama yang menghambat kelancaran proses pengoperasian program di lapangan (Hodomuan & Tuti, 2022; Tuhumury, Laurens, & Tuanaya, 2024; Umar, Nurmala, & Saputra, 2020). Selain aspek internal birokrasi, hambatan eksternal diartikan sebagai variabel makro yang berada di luar kendali teknis pengelola program, namun memiliki daya determinasi absolut terhadap capaian *output* kebijakan secara berkelanjutan. Variabel eksternal tersebut meliputi konfigurasi geografis wilayah dan kondisi jalur transportasi yang kurang mendukung (Arpandi & Aminah, 2023), tingkat kesadaran serta kedisiplinan kultural masyarakat dalam memilah dan membuang sampah (Raudah, Amalia, & Nida, 2022; Rengganis, Rahmaningrum, & Luhur, 2021), hingga dinamika penyesuaian regulasi serta pergeseran tata ruang akibat mega proyek pembangunan sektoral kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di sekitar wilayah administrasi program (Ramadoni, Sanata, & Gegana, 2023; Ritonga et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis untuk mengeksplorasi secara mendalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan program kebersihan di tingkat lokal. Lokus penelitian ditetapkan secara spesifik di Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan waktu pelaksanaan pengumpulan data yang berlangsung dari bulan Juni hingga November 2025. Fokus dalam kajian evaluatif ini diarahkan pada enam kriteria utama menurut kerangka teori William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program, serta mengurai hambatan operasional baik yang bersifat internal kelembagaan maupun intervensi variabel eksternal makro. Untuk mendapatkan data yang kredibel, penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian demi memperoleh data yang kaya dan representatif. Melalui teknik tersebut, peneliti menetapkan total 17 (tujuh belas) orang informan kunci yang terdiri dari 1 orang Lurah Sanipah, 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 1 orang Ketua Program

GSB, 5 orang Ketua RT, serta 9 orang warga masyarakat Kelurahan Sanipah selaku kelompok sasaran penerima manfaat langsung dari keberadaan program kebersihan ini.

Instrumen pengumpulan data dalam riset ini bertumpu pada tiga teknik utama yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama para informan untuk menggali persepsi, keluhan, dan komitmen para pihak terkait GSB, sedangkan teknik dokumentasi diterapkan untuk menghimpun data tertulis non-statistik seperti laporan realisasi keuangan swadaya, profil monografi kelurahan, serta berkas administrasi penelitian. Sementara itu, observasi lapangan dijalankan dengan mengamati langsung proses bongkar muat sampah oleh petugas, kondisi fisik Tempat Pembuangan Sementara (TPS), serta hambatan akses jalan tanah berlumpur menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sanipah. Seluruh data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengadopsi model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahapan yang berjalan secara simultan. Tahap pertama adalah reduksi data untuk menyederhanakan dan menajamkan catatan lapangan, diikuti dengan penyajian data (data display) dalam bentuk teks naratif deskriptif yang disusun secara sistematis, hingga tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi guna menjawab pertanyaan penelitian secara kuat, akurat, dan valid sesuai standar penulisan karya ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB)

Analisis terhadap pelaksanaan Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB) di Kelurahan Sanipah diuji secara komprehensif menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil verifikasi data di lapangan, performa program ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara capaian dimensi sosial di tingkat hulu (kesadaran warga) dengan realitas operasional logistik di tingkat hilir (pengangkutan dan pemrosesan akhir).

a) Efektivitas Program

Efektivitas program dievaluasi berdasarkan sejauh mana target pengurangan volume sampah dan perubahan perilaku pembuangan limbah secara liar dapat ditekan secara signifikan. Secara konseptual, GSB menorehkan keberhasilan pada fase awal penjemputan sampah dari rumah ke rumah (door-to-door). Indikator keberhasilan ini diperkuat oleh pengakuan Bapak Gozali, Bapak Andi Muksin, dan Bapak Syarif (Ketua RT 15, 16, dan 18) yang menyatakan bahwa program ini mempermudah warga dalam membuang sampah domestik sehingga lingkungan pemukiman menjadi lebih bersih dibandingkan era sebelum program terbentuk.

Gambar 1 Pengangkutan Sampah Yang Dilakukan Oleh Petugas Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB)



Sumber: Foto Pribadi dari Lapangan

Namun, efektivitas substantif program ini mengalami penurunan drastis pada aspek pengelolaan tingkat lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, tumpukan limbah residu harian masih meluber secara tidak teratur di bak penampungan sementara petugas kebersihan lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa instruksi pemilahan sampah organik dan anorganik dari tingkat dapur keluarga belum berjalan optimal, sehingga petugas lapangan terpaksa mengangkut sampah dalam kondisi tercampur padat. Target GSB untuk mereduksi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum tercapai sepenuhnya karena sebagian besar output kerja hanya sebatas memindahkan tumpukan limbah dari pemukiman menuju lokasi TPA tanpa adanya proses daur ulang yang masif.

b) Efisiensi Program

Kriteria efisiensi menitikberatkan pada rasio pemanfaatan input (anggaran, waktu, dan tenaga kerja) untuk menghasilkan output layanan yang optimal. Realitas operasional GSB menunjukkan tingkat efisiensi yang masih sangat rendah akibat besarnya pemborosan sumber daya. Proses pengangkutan sampah dari drum penampungan warga menuju bak truk dump masih mengandalkan kekuatan otot manual petugas lapangan tanpa bantuan sistem hidrolik mekanis. Keterlibatan tiga hingga empat petugas sekaligus dalam satu armada truk pengangkut memicu inefisiensi alokasi tenaga kerja dan pembengkakan pengeluaran insentif harian operasional.

Gambar 2 Proses Pengangkutan Sampah Dalam Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB)



Sumber: Foto Pribadi dari Lapangan

Ketidakefisienan ini diperparah oleh kondisi sampah yang masuk dalam keadaan belum dipilah, sehingga menambah berat muatan truk secara drastis. Akibatnya, konsumsi solar kendaraan membengkak secara eksesif, dan suku cadang truk mengalami kerusakan lebih cepat karena dipaksa mengangkut beban berat melintasi akses jalan tanah berlumpur. Struktur manajemen keuangan yang habis hanya untuk membiayai dampak kendala teknis harian ini menegaskan bahwa Program GSB belum mencapai titik efisiensi ekonomi yang berkelanjutan.

c) Kecukupan Program

Dimensi kecukupan menilai seberapa jauh hasil capaian Program GSB mampu menuntaskan akar permasalahan sampah domestik di Kelurahan Sanipah secara menyeluruh. Eksistensi 11 unit Bank Sampah Unit (BSU) yang telah tersebar di tingkat RT memberikan secercah kontribusi ekonomi sirkular lokal bagi para nasabah. Namun, berdasarkan data resmi rekapitulasi Bank Sampah Kelurahan Sanipah, volume sampah residu harian yang dihasilkan hampir setara atau bahkan sebanding dengan volume sampah yang berhasil dikelola. Sebagai contoh, BS Sehat Lingkungan mencatat sampah terkelola sebesar 0,98 ton per hari namun menyisakan residu hingga 0,9 ton per hari, begitu pula dengan BS Maju Bersama yang menghasilkan sampah residu 0,8 ton per hari dari 0,82 ton sampah terkelola. Keseimbangan angka residu yang tinggi ini menjadi bukti empiris bahwa kapasitas kelembagaan BSU yang masih berskala komunitas kecil belum cukup kuat untuk membendung laju pertumbuhan produksi limbah cair dan padat dari ribuan kepala keluarga di Sanipah secara jangka panjang.

Tabel 1 Data Bank Sampah Unit (BSU) Kelurahan Sanipah

No	Nama Bank Sampah	BSU	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Residu (Ton/Hari)	Jumlah SDM (Anggota)	Omset (Perbulan)	Jumlah Nasabah
1.	BS Semangat Ceria	BSU	0,103	0,13	8	Rp. 690.250,00	43KK
2.	BS Maju Bersama	BSU	0,82	0,8	8	Rp. 571.110,00	34KK
3.	BS Sumber Bersih	BSU	0,71	0,7	6	Rp. 328.250,00	29KK
4.	BS Sanipah Bersatu	BSU	0,55	0,5	5	Rp. 408.000,00	23KK
5.	BS Sumber Berkah	BSU	0,111	0,11	5	Rp. 906.680,00	46KK
6.	BS Jaya Bersama	BSU	0,53	0,5	8	Rp. 138.890,00	22KK
7.	BS Bina Kreatif	BSU	0,36	0,3	4	Rp. 212.000,00	15KK
8.	BS Sehat Lingkungan	BSU	0,98	0,9	9	Rp. 835.000,00	41KK
9.	BS Sanipah Barokah	BSU	0,72	0,7	7	Rp. 202.000,00	28KK
10.	BS Melati Maju	BSU	0,72	0,7	7	Rp. 737.500,00	30KK
11.	BS Bina	BSU	0,74	0,7	7	Rp.	31KK

	Bersama					752.500,00	
--	---------	--	--	--	--	------------	--

Sumber: Data Bank Sampah Unit Kelurahan Sanipah

d) Pemerataan Layanan

Pemerataan mengukur keadilan distributif akses layanan pengelolaan sampah di setiap Rukun Tetangga secara konsisten. Meskipun skema awal GSB ditujukan untuk menyisir seluruh rumah tangga tanpa terkecuali, praktiknya di lapangan memicu ketimpangan distribusi layanan yang mencolok. Wilayah RT yang berada di sepanjang jalan protokol atau dekat dengan pusat administrasi kelurahan mendapatkan ritme penjemputan sampah yang teratur. Sebaliknya, wilayah RT pedalaman atau pemukiman nelayan yang berada di tepian garis pantai Selat Makassar sering kali diabaikan atau jarang dilewati armada. Kendala keterbatasan armada truk dan motor roda tiga menyebabkan petugas kebersihan melakukan selektivitas wilayah penjemputan secara alami, sehingga tumpukan sampah sekunder menumpuk di area-area yang terisolasi secara geografis.

Gambar 3 Pengelolaan Sampah Melalui Kegiatan Bank Sampah Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat



Sumber: Foto Pribadi dari Lapangan

e) Responsivitas Kebijakan

Responsivitas mengukur ketanggapan dan kecepatan pengelola program dalam menindaklanjuti keluhan serta kebutuhan mendesak dari masyarakat sasaran. Program GSB dinilai responsif pada fase awal karena merintis sistem jemput bola yang memanjakan warga, namun daya tanggap kelembagaannya melemah ketika dihadapkan pada komplain lapangan. Warga sering kali mengeluhkan keterlambatan pengangkutan yang membuat drum penampungan di depan rumah mereka membusuk dan menimbulkan bau menyengat selama berhari-hari. Keterbatasan jumlah petugas dan armada operasional membuat manajemen pengelola lambat dalam mengeksekusi pengangkutan darurat, sehingga memicu perlambatan respons operasional (*responsiveness lag*) yang menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Gambar 4 Pengumpulan Sampah Rumah Tangga Yang Dilakukan Secara Langsung Oleh Petugas Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB)



Sumber: Foto Pribadi dari Lapangan

f) Ketepatan Program

Kriteria ketepatan menguji apakah arah intervensi kebijakan GSB sudah sesuai dengan karakteristik lingkungan fisik dan sosial target sasaran. Secara konseptual, program ini memiliki nilai ketepatan yang sangat tinggi untuk karakteristik Kelurahan Sanipah sebagai kawasan pesisir. Sebelum program dibentuk, tradisi masyarakat lokal cenderung membuang limbah domestik langsung ke aliran sungai atau perairan laut. Kehadiran layanan pintu ke pintu dari GSB berhasil memutus rantai kebiasaan buruk tersebut secara bertahap. Namun, program ini menjadi tidak tepat secara implementatif di tingkat hilir, karena pemrosesan akhir di TPA Sanipah masih menerapkan metode penimbunan terbuka (*open dumping*) tanpa adanya teknologi sanitasi modern, sehingga esensi kebersihan di hulu justru mencemari tanah dan air di hilir.

Gambar 5 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sebagai Lokasi Akhir Pengelolaan Sampah Dalam Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB)



Sumber: Foto Pribadi dari Lapangan

Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Program GSB

Kegagalan optimalisasi Program GSB bersumber dari akumulasi kendala internal kelembagaan dan intervensi variabel eksternal makro yang bergerak secara dinamis di

luar kendali pengelola kelurahan.

a) Hambatan Internal

Kelemahan endogenitas organisasi pengelola GSB berakar dari kerapuhan kapasitas fiskal dan keterbatasan fasilitas fisik. Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Keuangan periode Januari-Juni 2025, kas pengelola secara konsisten mengalami defisit struktural akibat tingginya biaya tetap operasional (*fixed cost*). Meskipun iuran swadaya masyarakat merangkak naik dari Rp13.013.000,00 di bulan Januari menjadi Rp18.522.000,00 di bulan Juni, akumulasi pemasukan tersebut langsung habis terserap untuk pos pengeluaran gaji/insentif petugas lapangan yang berkisar antara Rp3.600.000,00 hingga Rp8.300.000,00 per bulan, serta belanja solar truk yang sempat menembus angka Rp5.065.000,00 pada bulan Mei.

Tabel 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program GSB Periode Januari-Juni 2025

Bulan	Total Pemasukan Iuran (Rp)	Pengeluaran Solar (Rp)	Pengeluaran Gaji/Insentif (Rp)	Operasional & Uang Makan (Rp)	Total Pengeluaran (Rp)
Januari	Rp13.013.000,00	Rp4.320.000,00	Rp4.925.000,00	Rp875.000,00	Rp23.133.000,00
Februari	Rp12.573.000,00	Rp3.000.000,00	Rp8.300.000,00	Rp0,00	Rp23.873.000,00
Maret	Rp14.533.000,00	Rp2.860.000,00	Rp8.300.000,00	Rp2.950.000,00	Rp28.643.000,00
April	Rp14.295.000,00	Rp4.930.000,00	Rp7.000.000,00	Rp1.450.000,00	Rp27.675.000,00
Mei	Rp15.972.000,00	Rp5.065.000,00	Rp3.600.000,00	Rp550.000,00	Rp25.187.000,00
Juni	Rp18.522.000,00	Rp2.840.000,00	Rp1.620.000,00	Rp440.000,00	Rp23.422.000,00

Sumber. Bendahara Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB)

Keterbatasan dana ini membuat pengelola lumpuh untuk melakukan peremajaan sarana, sehingga operasional harian terpaksa bertumpu hanya pada 2 unit truk angkut tua yang sering mengalami kendala mogok mesin. Dampak domino dari minimnya fiskal ini juga memicu kelangkaan jumlah personel pengawas lapangan, karena seluruh tenaga kerja yang ada di bawah pimpinan Bapak Harlan sudah habis terkuras untuk aktivitas fisik pengangkutan sampah domestik sehari-hari, menyebabkan fungsi edukasi pemilahan sampah di tingkat RT menjadi mandek.

Gambar 6 Proses Pengangkutan Sampah dan Kondisi Akses Jalan di TPA Sanipah



Sumber: Foto Pribadi dari Lapangan

b) Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terbesar bersumber dari disrupsi tata ruang wilayah akibat eskalasi mega proyek pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kebijakan makro regional tersebut berimplikasi langsung pada penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal di Samboja yang masuk dalam zona delineasi inti IKN. Dampak perubahan ini memaksa truk GSB melakukan perjalanan pembuangan akhir ke lokasi TPA transit yang jarak tempuhnya sangat jauh.

Gambar 7 Kondisi Akses Jalan Menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA)



Sumber: Foto Pribadi dari Lapangan

Kondisi ini diperparah oleh tantangan geografis berupa rusaknya akses jalan tanah konvensional sepanjang 1,5 kilometer menuju lokasi TPA baru. Setiap kali musim hujan tiba, jalan tanah tersebut berubah menjadi kubangan lumpur pekat yang sering kali membuat ban truk amblas berjam-jam. Hambatan fisik luar biasa di hilir ini berujung pada kekacauan jadwal penjemputan sampah di tingkat hulu permukiman warga Kelurahan Sanipah.

Ditambah dengan rendahnya disiplin kultural sebagian masyarakat pesisir yang enggan memilah kantong plastik dan menolak membayar iuran wajib kebersihan,

Program GSB terjebak dalam lingkaran masalah yang kompleks dari hulu hingga ke hilir.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai evaluasi kebijakan Program Gerakan Sanipah Bersih (GSB) di Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki konsep dan ketepatan yang sangat baik dalam merintis sistem pengelolaan sampah mandiri pintu ke pintu (door-to-door). Intervensi lokal ini terbukti tepat guna dan responsif pada fase awal dalam mengubah kebiasaan buruk masyarakat pesisir yang sebelumnya terbiasa membuang limbah domestik langsung ke sungai atau perairan Selat Makassar. Namun, jika diuji memakai kerangka analisis William N. Dunn, tingkat efektivitas dan kecukupan program ini dinilai belum optimal di lapangan. Hal tersebut dibuktikan oleh tingginya volume sampah residu di 11 unit Bank Sampah Unit (BSU) yang angkanya hampir setara dengan sampah terkelola karena masyarakat belum disiplin memilah jenis limbah sejak dari dapur rumah tangga. Selain itu, indikator efisiensi dan pemerataan layanan juga masih sangat rendah akibat proses pemindahan sampah yang masih mengandalkan tenaga otot manual petugas tanpa mekanisasi hidrolis, yang pada akhirnya memicu ketimpangan distribusi layanan berupa keterlambatan pengangkutan di RT pedalaman dan pesisir terpencil.

Mandeknya optimalisasi capaian Program GSB ini disebabkan oleh akumulasi hambatan internal organisasi pengelola serta intervensi variabel eksternal makro yang berada di luar kendali pihak kelurahan. Dari dimensi internal, kelangkaan kapital menjadi akar masalah utama karena program secara kronis mengalami defisit kas finansial akibat hanya bergantung pada iuran swadaya warga. Kerapuhan fiskal tersebut berimbas langsung pada keterbatasan fasilitas fisik yang hanya bertumpu pada 2 unit truk tua, minimnya alat penunjang, serta kurangnya jumlah personel lapangan yang mengakibatkan fungsi pengawasan dan edukasi di tingkat RT menjadi lumpuh akibat beban kerja petugas yang terlalu tinggi. Sementara dari dimensi eksternal, keberlanjutan program dijepit oleh disrupsi kebijakan makro regional berupa penutupan TPA lokal yang masuk dalam zona delineasi pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hambatan spasial-geografis berupa rusaknya akses jalan tanah sepanjang 1,5 kilometer menuju lokasi pembuangan akhir baru yang berubah menjadi kubangan lumpur pekat saat musim hujan, pada akhirnya melumpuhkan efisiensi waktu armada truk dan mengunci keberhasilan implementasi program dari hulu hingga ke hilir.

Saran

Untuk berbagai kelemahan dan hambatan dalam implementasi kebijakan di lapangan, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai langkah taktis perbaikan Program GSB di masa depan. Langkah utama yang harus segera ditempuh oleh Pemerintah Kelurahan Sanipah adalah melakukan restrukturisasi model pembiayaan operasional melalui

penyusunan regulasi lokal yang lebih mengikat, sekaligus aktif menjalin kemitraan strategis bersama sektor swasta di Kecamatan Samboja untuk menyerap dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar program tidak lagi bergantung tunggal pada iuran warga. Selanjutnya, pihak pengelola disarankan mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pengadaan armada mekanis hidrolik dan motor roda tiga pengangkut guna menghapus sistem kerja manual, menekan biaya solar, serta menjamin pemerataan jangkauan layanan penjemputan sampah secara adil hingga ke gang-gang sempit di pemukiman nelayan pesisir pantai.

Selain perbaikan pada aspek sarana dan finansial internal, pengelola program bersama aparaturnya kelurahan dan para Ketua RT wajib merevitalisasi gerakan edukasi pemilahan sampah organik serta anorganik langsung dari tingkat rumah tangga. Edukasi kultural ini harus diperkuat dengan penegakan sanksi sosial atau denda administratif yang tegas bagi warga yang masih bersikap permisif membuang limbah rumah tangga ke semak belukar atau membakarnya di pekarangan. Terakhir, guna memitigasi hambatan geografis di sektor hilir, diperlukan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah untuk segera melakukan pengerasan infrastruktur jalan akses menuju TPA transit serta merumuskan pembagian zonasi waktu pelayanan pengangkutan agar ritme pembersihan sampah domestik di Kelurahan Sanipah dapat berjalan konsisten, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika tata ruang wilayah penyangga IKN.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Kebijakan Di Indonesi. In *Ideas Publishing*. Ideas Publishing.
- Arpandi, A., & Aminah, S. (2023). Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4750–4755. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1809>
- Budiarta, I. W., Kasni, N. W., & Susini, M. (2021). Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Pegawai UPTD Tempat Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. *Jurnal Abdidias*, 2(5), 1168–1179. <https://doi.org/10.31004/abdidias.v2i5.442>
- Dr. Wahidmurni, M. P. (2017). *PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF*. 1–17.
- Edhi Sarwono, Yudhistiro Indro Saputro, B. N. W. (2017). *Jurnal "Teknologi Lingkungan "*, Volume 1 Nomor 01, Juni 2017 *Jurnal "Teknologi Lingkungan "*, Volume 1 Nomor 01, Juni 2017. 1(09), 27–35.
- Hadomuan, M. T., & Tuti, R. W. (2022). *Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan*. 13, 7–14.
- Hardiyanti, K. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Kalikondang Kabupaten Demak. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.10506>
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112–122.

- Hilda Nurtin Salsabila, Supri Hartono, Drs. Radjikan, M. S. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAMPENANGANAN SAMPAH DI KOTA SIDOARJO JAWA TIMUR*. 4(05), 1–23.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitatitve Data Analysis*.
- Mismiana, C., & Kuntadi, C. (2023). Analisis yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran sebagai salah satu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 344–353.
- Prajati, G., & Suhenra Maulana. (2023). Analisa Hubungan Pengelolaan Sampah Terhadap Kejadian Diare di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(1), 7830–7837. <https://doi.org/10.32672/jse.v9i1.765>
- Putra, W. T., & Ismaniar. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.37411/jjce.v1i2.569>
- Ramadoni, S. R., Sanata, K., & Gegana, R. P. (2023). Ekonomi Sirkular : Tantangan Dan Peluang Pengaturan Pengelolaan Sampah dan Limbah di IKN Nusantara. *Prosiding Nasional Universitas Abdurachman Saleh Situbondo*, 1, 416–428.
- Raudah, S., Amalia, R., & Nida, K. (2022). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. *Al Iidara Balad*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.4.1.42>
- Rengganis, I. T., Rahmaningrum, R., & Luhur, R. (2021). *Peran Program Betulungan Beberseh Kampong Dalam Perilaku Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara*. 2(1), 31–44.
- Ritonga, I. R., Suyatna, I., Eryati, R., Adnan, A., Paputungan, M. S., Kusumaningrum, W., Nurfadilah, N., Suryana, I., Novia, R., Ahmad, A., Firman, F., Arwadi, T., & Bulan, D. E. (2023). Penyediaan Tempat Sampah Berdasarkan Kategori sebagai Upaya Mengurangi Sampah di Pantai Wisata Tanah Merah Samboja. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1), 69–78. <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i1.614>
- Shofiyah, R., & Irawati, I. (2024). Pengolahan Sampah Polimer Termoplastik dan Termoset di Lingkungan Bank Sampah Induk Kabupaten Jember. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 180–190. <https://doi.org/10.31334/jks.v6i2.3548>
- Sidebang, citra pratiwi. (2022). *ANALISIS DAMPAK TIMBUNAN SAMPAH DI SEKITAR LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TANJUNG PINGGIR KOTA PEMATANGSIANTAR* Citra. 1(1), 19–30.
- Syaiful Fadly, Adri Patton, I. S. (2021). Analisis Implementasi Pengelolaan Sampah Melalui "Sahabat Sampah" Sebagai Inovasi Penanganan Sampah Di Kecamatan Samboja. *Jurnal Administrative Reform*, 9(1), 1–13.
- Tajuddin, A., Rizal, R., Yanti, R. Z., & ... (2022). Pengembangan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. *Jurnal ADAM ...*, 1(2), 318–334.
- Torang Hodomuan, M., & WD Tuti, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan